

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
PENGADILAN NEGERI MANADO**

Oleh:

Niton Tabo

Nim : 21043112



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
PENGADILAN NEGERI MANADO**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Studi Program D 4 Akuntansi Keuangan
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado**

Oleh:

Niton Tabo

NIM: 21 043 112



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
PENGADILAN NEGERI MANADO**

Oleh:

Niton Tabo

NIM: 21 043 112

*



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir pada hari kamis tanggal 04
September 2025, pukul : 11.00 Wita di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Niton Tabo
NIM, 21043112

Dan yang bersangkutan dinyatakan

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Jeffry Otniel Rengku, SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 196309241994031001
Anggota Penguji 1 : Johanes Hebert Tene, SE.,MSA.,Ak.
NIP. 197406232008011003
Anggota Penguji 2 : Belthasar Trito Siahaan, SE.,M.Si
NIP. 199208162022031008

Mengetahui,

JURUSAN AKUNTANSI

Ketua

Sekretaris


Raymond Festus Rombot, SE.,MSi
NIP. 19740214 200312 1 002


Joseph Nugraha Tangon, SE.,MSA
NIP. 19760904 200501 1 001

LEMBAR PERTUJUAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI MANADO

Oleh

NAMA : Niton Tabo
NIM : 21043112
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui Untuk Diujikan

Manado 20 Agustus 2025

Pembimbing 1



Jerry S. Lintong, SE., MAP

NIP. 19661012 199702 1 001

Pembimbing 2



Jolly L.R. Turangan, SH.M.HUM

NIP. 1968071219944031003

Mengetahui,

Koordinataor Program Studi

Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS

NIP. 197002051998022002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisnial, Merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi maupun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang pernah secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur- unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 2025

Penulis

Meterai Rp

10.000

Niton Tabo

Nim. 21043112

ABSTRAK

Niton tabo 2015 juli **Analisis Implementansi Pengelolaan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Manado**, program studi akuntansi keuangan, politeknik negeri manado, pembimbing i: Jerry S. Lintong, SE., MAP dan pembimbing ii: Jolly L.R. Turangan, SH., M. HUM.

Pelayanan publik merupakan salah satu isu sentral yang berkembang disector public.

Hal ini sering terjadi seiring dengan proses demokratis yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka selaku pembayar pajak. Sehingga aparatur pemerintah memiliki obligasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara prima dan bertanggung jawab.

Salah satu jenis pelayanan publik tersebut adalah pelayanan administrative yang komponennya adalah pembuatan paspor. Kantor pengadilan negeri manado tangan departemen hukum dan ham ri yang secara langsung berhadapan dengan pemohon sangat di perlukan kinerja penyelenggaraan pelayanannya. oleh karenanya, terdapat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke arah yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan warganegara.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seperti apa

Analisis implementasi pengelolaan keuangan di kantor pengadilan negeri manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi narasi yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku,dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kata kunci : pelayanan publik, kantor pengadilan negeri manado.

ABSTRAK

Niton tabo 2015 juli Analisis Implementansi Pengelolaan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Manado, program studi akuntansi keuangan, politeknik negeri manado, pembimbing i: Jerry S. Lintong, SE., MAP dan pembimbing ii: Jolly L.R. Turangan, SH., M. HUM.

Pelayanan publik merupakan salah satu isu sentral yang berkembang disector public.

Hal ini sering terjadi seiring dengan proses demokratis yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka selaku pembayar pajak. Sehingga aparat pemerintah memiliki obligasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara prima dan bertanggung jawab.

Salah satu jenis pelayanan publik tersebut adalah pelayanan administrative yang komponennya adalah pembuatan paspor. Kantor pengadilan negeri manado tangan departemen hukum dan ham ri yang secara langsung berhadapan dengan pemohon sangat di perlukan kinerja penyelenggaraan pelayanannya. oleh karenanya, terdapat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke arah yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan warganegara.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seperti apa

Analisis implementasi pengelolaan keuangan di kantor pengadilan negeri manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsi narasi yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi langsung dilapangan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kata kunci : *pelayanan publik, kantor pengadilan negeri manado.*

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Niton Tabo
Tempat/Tanggal Lahir	: Kumbur, 07 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Agama	: Kristen Prosetan
Nim	: 21043112
Jurusan	: Akuntansi
Prodi	: Keuangan D4
Alamat	: Kelurahan Permai 1, Lingkungan 10 Kecamatan Mapaget
No. Telpon /Wa	: 087797720536 / 081385616721
Email	: Taboniton86@Gmail.Com
Nama Orang Tua	
Ayah	: Mendami Tabo
Ibu	: Darina Lambe
Nama Kaka & Adik	
Kaka	: Walian Tabo
Adik	: Mironi Tabo
Riwayat Pendidikan	
TK	: TK Kanggime
SD	: SD Inpres Wiwi
SMP	: SMP Negeri Kanggime
SMA	: SMA Negeri Kanggime
Universitas	: Politeknik Negeri Manado

KATA PENGATAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN yang MAHA ESA yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

Penyusunan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari tanpa doa dan usaha yang keras, tugas akhir ini tidak dapat terselesaikan. Judul tugas akhir yang Penulis ajukan adalah “analisis implementasi pengelolaan keuangan pada pengadilan negeri manado di kantor pengadilan negeri manado”

Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Niton tabo jurusan akuntansi di politeknik negeri manado.

Dalam penyusunan tugas akhir, penulis menyadari keterbatasan penulis yang tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait, maka tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra.Maryke Alelo, MBA. selaku direktur politeknik negeri Manado.
2. Aymond Festus Rombot, SE., MSi selaku ketua jurusan akuntansi
Politeknik negeri manado.
3. Joseph Nugraha Tangon, SE., MSA selaku sekretaris jurusan akuntansi
Politeknik negeri manado.
4. Jerry S. Lintong, SE., MAP selaku dosen pembimbing i
5. Jolly L.R.Turangan,SH.M.HUM selaku dosen pembimbing ii
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan politeknik negeri manado yang telah membantu selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Bapak dan ibu serta staff pegawai kantor pengadilan negeri manado yang telah memberikan pengajaran serta membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Buat keluarga terutama papa, mama, adik dan juga keluarga yang Senantiasa memberikan doa dan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Manado, 2025

Penulis

Niton tabo

Nim. 21043112

DAFTAR ISI

HAMANJUDUL.....	i
LEMPARPENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	ix
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Berpikir.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 1. Tujuan Pustaka.....	6
2.1 2. Pengelolaan Keuangan.....	8
2.1 3. Pengertian Pengelolaan Keuangan.....	8
2.1 4. Fungsi Pengelolaan Keuangan.....	9
2.1 5. Tujuan Pengelolaan Keuangan.....	11
2.1 6. Kerangka Berpikir.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	21
3.3. Sumber Data.....	21
3.4. Data Pirimer.....	22
3.5. Data Sekunder.....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7. Observasi.....	32
3.8. Dokumentansi.....	33
3.8. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN.....	19
4.1. Gambaran umum.....	20
4.1. Penelitian.....	20
4.2. Sejarah kantor pengadilan negeri manado.....	20
4.3. Visi dan misi.....	21
4.4. Logo pengadilan negeri manado.....	21
4.5. Struktur organisasi.....	23
4.5. Uraian pekerjaan.....	28
B.4.1. pembahasan.....	30
4. 1. proses pengelolaan keuangan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Manado.....	39
4. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Manado.....	26
4.3. Efektivitas sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Manado.....	26
BAB V PENUTUP.....	59
5. 1 kesimpulan	61
5.2 Rekomendasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	teks	halaman
4.1	kantor pengadilan negeri manado	15
4.2	struktur organisasi & job description	18
4.3	standar operasional prosedur (sop	21
4.4	ruang tunggu	23
4.5	tempat parkir	23

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
4.1	Laporan Statistik pengadilan negeri manado	24
4.2	Tanggapan Responden	26

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	66
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	68-69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan organisasi, termasuk lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Manado. Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Dalam konteks lembaga peradilan, pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan keadilan yang ditegakkan.

Pengelolaan keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan (Irfani: 2020)

Pengadilan Negeri Manado, sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu penting untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengadilan ini. Dengan memahami cara pengelolaan keuangan dilaksanakan, diharapkan dapat ditemukan potensi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Di era reformasi birokrasi dan peningkatan tuntutan transparansi, pengelolaan keuangan yang baik di lembaga peradilan menjadi semakin penting. Pengadilan Negeri Manado, sebagai salah satu pengadilan di Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tepat, tetapi juga dengan pelaporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Manado, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lembaga peradilan, serta mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pengadilan negeri manado merupakan tempat atau fasilitas bagi masyarakat Sulawesi utara dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan menurut konsep Peradilan Agama pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum, yaitu hanya terbatas pada perkara perdata berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, peradilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut hukum acara yang berlaku, yang dalam peradilan pada peradilan umum digunakan Hukum Acara Perdata. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materil oleh hakim.

acara perdata mengatur tentang bagaimana dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum materil apabila terjadi pelanggaran hukum materil.³ Hukum acara perdata pada umumnya merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan).⁴ Konsep dan perkembangannya setelah kemerdekaan Indonesia, peradilan agama mulai mendapatkan pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan di lingkungan:

1. peradilan umum;
2. peradilan agama;
3. peradilan militer;
4. peradilan tata usaha negara .”

Dari aspek sosiologis, keberadaan Peradilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa “Peradilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam.” Sesuai dengan ketentuan ini, aspek sosiologis-historis Pengadilan Agama adalah Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia; dan Kedua, menunjukkan hakikat pluralisme hukum, yang mana Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa pluralisme hukum berarti adanya sistem atau budaya hukum yang berbeda dalam satu komunitas politik. 5 Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari terutama di era modernisasi ini, karena kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia terutama dalam hal memberikan peningkatan keefektifan dan keefisienan. Saat ini, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu massif hal ini berdampak pula pada sistem peradilan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Manado?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Manado?
3. Bagaimana efektivitas sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pengelolaan keuangan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Manado
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Manado
3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri Manado?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4 Bagi Penulis dan masyarakat:

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk study lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan di lembaga peradilan
1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga peradilan.

1.4 Bagi Pengadilan Negeri Manado:

2. Dapat menjadi masukan untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1 Pengelolaan Keuangan

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1).

Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020:11) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Berdasarkan pengertian dari kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu disiplin yang mencakup berbagai aktivitas terkait perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan. Secara keseluruhan, manajemen keuangan merupakan elemen kunci dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang manajemen keuangan sangat penting bagi setiap individu atau organisasi yang ingin mengelola keuangan mereka dengan baik

1. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) tersebut, adalah :

1. Perencanaan Keuangan dan Anggaran (Budgeting) Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.
2. Pengendalian (Controlling) Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya.
3. Pemeriksaan (Auditing) Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
4. Pelaporan (Reporting) Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.

Sedangkan menurut Aisyah et al., (2020:21) fungsi-fungsi manajemen secara umum adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan mulai dari arus kas sampai dengan laba rugi perusahaan.
2. Penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pengalokasian supaya efisiensi dan efektivitas anggaran biaya tercapai.
3. Pengawasan ditujukan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan.
4. Pengauditan perusahaan bentuknya adalah audit internal yang harus dilakukan untuk menguji kesesuaian objek dengan standar akuntansi/ketentuan yang berlaku dan memastikan tidak terjadinya penyimpangan.
5. Pelaporan adalah melaporkan keadaan keuangan perusahaan dan analisis rasionya

6. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty (2019:1) tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik. Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip:

1. Konsistensi, merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
2. Akuntabilitas, merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan
3. Transparansi, prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam hal laporan keuangan.

4. Kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan ini, pihak pengelola memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin.

Pengelolaan keuangan tidaklah hanya untuk memaksimalkan laba melainkan untuk meminimumkan biaya hal ini dikarenakan melalui pengelolaan yang baik diharapkan mampu menekan biaya-biaya yang mungkin timbul dari operasi perusahaan (Armereo et al., :2020:6). Sedangkan menurut Kariyoto (2018:6) ada beberapa tujuan dari pengelolaan dana perusahaan yaitu :

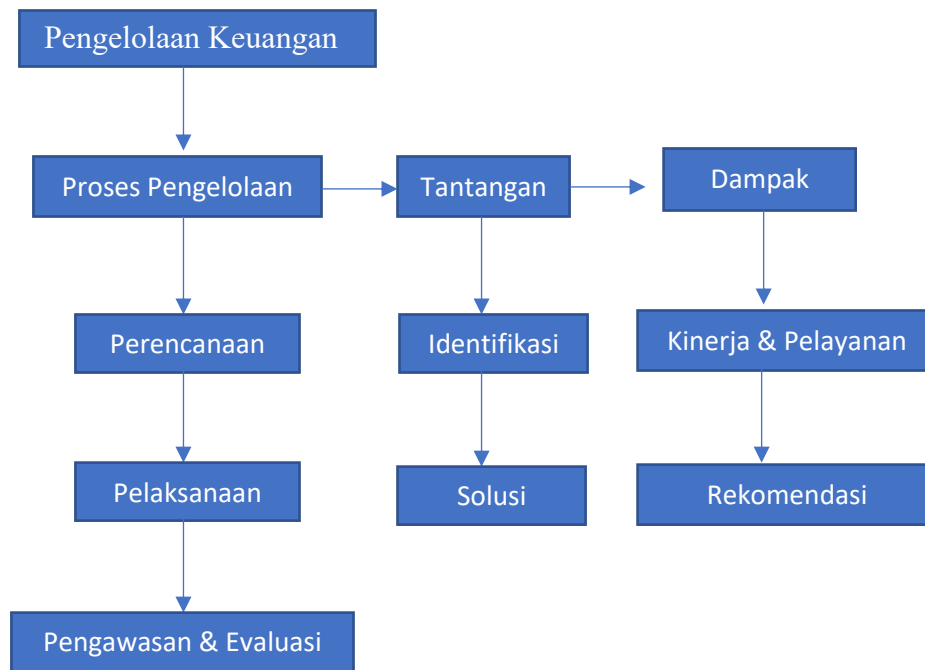
- a. Memaksimalkan nilai perusahaan
- b. Menjaga stabilitas financial dalam situasi yang selalu terkontrol.
- c. Memperkecil risk perusahaaan masa kini dan yang masa yang akan datang.

PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
Alfanny Leonita Rosyid, Sabrina Rizqia Maimanah, Suci Ramadhani, dkk 2024	Implementasi Akuntansi Pemerintah pada Instansi Pemerintah dalam Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Kualitatif deskriptif	Fokus utama penelitian ini adalah penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara real-time dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan SAP berbasis akrual dan SIKD dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, kualitas SDM yang terbatas dan kesulitan teknis dalam transisi dari sistem kas ke akrual masih menjadi hambatan signifikan.
Muhammad Mudhofar 2022	Analisis Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Des	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan azas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan value for money dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka konsep merupakan kerangka berpikir dari peneliti yang memuat teori atau konsep yang akan dijadikan dasar oleh peneliti biasanya disajikan dalam bentuk bagan sehingga hubungan antar variable lebih terlihat jelas (Nisfil et al., 2024). Kerangka berpikir merupakan pemahaman peneliti tentang hubungan antar variabel dalam penelitiannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana peneliti melakukan penelitian dengan observasi dan terjun langsung kelapangan pada saat proses penelitian berlangsung untuk memahami fenomena sosial atau perilaku secara mendalam dan rinci. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi menyeluruh tentang pengalaman, dan praktik terkait dengan program pemberdayaan masyarakat Menurut Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Penelitian kualitatif ini lebih mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pengadilan negeri manado

Kompleks pengadilan terpadu, jl. Prof. Dr. Mr. Raden soelaiman efendi koesoemah atmadja, kima atas, kec. Mapanget, kota manado.

Penelitian ini dilaksanakan selama masa magang berlangsung terhitung mulai dari bulan februari 2025 - mei 2025.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan langsung dari objek atau subjek penelitian oleh peneliti sendiri misalnya melalui wawancara observasi atau kuesioner

3.3.1 Data Primer

Data ini didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Keuangan dan Aset Putas pengadilan negeri manado atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara untuk mendapatkan data yang objektif.

1.4.2. Data Sekunder

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada pengadilan negeri manado tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi utara dimana penulis secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu pengadilan tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi utara, untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada pengadilan negeri manado tenaga kerja dan transmigrasi provinsi sulawesi utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data terkait penelitian. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis guna memberikan hasil yang signifikan. Menurut para ahli seperti riduwan (2010) dan sugiyono (2017), teknik ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam penelitian karena bertujuan untuk menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan baik itu Teknik ini sangat efektif untuk mendapatkan data aktual yang mencerminkan situasi sebenarnya. Contohnya, dalam penelitian tentang perilaku mahasiswa di dalam perusahaan, peneliti dapat mencatat interaksi antar mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen selama proses belajar mengajar berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara salah satu pegawai derri l. putra merupakan bawah teknik yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali informasi mendalam, seperti pandangan, pengalaman, atau opini narasumber. Sebagai contoh, wawancara dengan seorang pakar lingkungan hidup dapat memberikan perspektif berharga mengenai kebijakan terkait pelestarian dalam.

C. Dokumentansi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman video, atau arsip lain yang sudah ada. Metode ini sangat berguna untuk menghemat waktu karena data yang diperlukan sudah tersedia. Misalnya, dalam penelitian tentang perkembangan keuangan perusahaan, peneliti dapat menggunakan laporan tahunan sebagai sumber data utama.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data di pengadilan negeri manado berfokus pada pengumpulan pengelolaan dan penyajian data perkara secara sistematis proses ini mencakup pembuatan statistik perkara penyusunan laporan keuangan serta penyimpanan arsip berkas perkara selain itu terdapat juga upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi seperti aplikasi portal analisis data berbasis peta (PANADA) yang dikembangkan oleh badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kota manado aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah akses informasi dan administrasi bagi masyarakat serta internal pemerintah kota manado.

3. Kuesioner

Studi kepustakaan studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Jenis Objek Dan Subjek

4.1.1 Sejarah singkat pengadilan negeri manado

Pengadilan negeri manado, awalnya bagian dari pengadilan negeri tomohon, berpindah ke manado pada tahun 1953. Awalnya, wilayah hukumnya mencakup manado dan minahasa. Pada tahun 2020, pengadilan negeri manado pindah ke kompleks pengadilan terpadu manado dan diresmikan pada tahun 2021.



*Gambar 4.1 Kantor pengadilan negeri manado pn
Sumber : Kantor pengadilan negeri manado*

Penelitian ini dilakukan di kantor pengadilan negeri manado Kompleks pengadilan terpadu, jl. Prof. Dr. Mr. Raden soelaiman efendi koesoemah atmadja, kima atas, kec. Mapanget, kota manado.

Penelitian ini dilaksanakan selama masa magang berlangsung terhitung mulai dari bulan februari 2025 - mei 2025.

b. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan langsung dari objek atau subjek penelitian oleh peneliti sendiri misalnya melalui wawancara observasi atau kuesioner

4.2 Sejarah Pengadilan Negeri Manado

Adalah lembaga peradilan yang berada di kota manado, ibu kota provinsi sulawesi utara, di indonesi. Pengadilan ini memiliki tugas untuk menangani berbagai perkara bidana, perdata dan masalah hukum lainnya yang terjadi di wilayah hukum kota manado dan sekitarnya. Sejarah pengadilan negeri manado terkait aret dengan perkembangan sistempengadilan di indonesia, terutama setelah kemerdekaan.

Pada masa perjajahan belahda, sistem pengadilan berlaku di Indonesia

adalah sistem peradilan kolonial yang dikelola oleh pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial setelah indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem peradilan di indonesia peransfomarsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku di negara merdeka.

Pengadilan negeri manado sendiri didirikan untuk menyalani masyarakat di daerah tersebut, termasuk menyelesaikan sengketa perdata dan bidana. Seiring berjalannya waktu, pengadilan negeri manado terus beradaptasi dengan perkembangan hukum nasional dan juga menerapkan berbagai reformasi untuk meningkatkan pelayanan

4.3 Hasil penelitian terkini

1. Implementasi gugatan sederhana (small claim court)

Penelitian normatif menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana di pn manado (dengan dasar perma no. 2 tahun 2015 dan no. 4 tahun 2019) efektif memberikan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan dengan biaya rendah. Namun, penerapan ini bersifat terbatas (limitative)—apabila tidak memenuhi syarat, perkara tak bisa lewat jalur ini. Disarankan agar ketentuan pelaksanaannya diperkuat dan disosialisasikan lebih luas.

2. Gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai

Tesis ini mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di PN Manado. Tujuannya untuk memahami bagaimana pengelolaan SDM dilakukan dan bagaimana gaya kepemimpinan dapat meningkatkan efektivitas kinerja sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

3. Pelaksanaan e-Court pada Perkara Perdata

Penelitian empiris dari politeknik negeri manado pelaksanaan sistem e-court di pn manado. Hasilnya menunjukkan bahwa *e-court* berkontribusi signifikan dalam efisiensi penanganan perkara perdata khususnya dalam hal waktu dan penghematan biaya bagi publik.

4. 4 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Manado

a.) visi dan misi

1.) Visi:

Pengadilan negeri manado sejalan dengan mahkamah agung republik indonesia, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung

2.) Misi:

Menjaga kemandirian memastikan bahwa pengadilan negeri manado beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan menyediakan layanan yang hukum adil dan transparan kepada semua pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengembangkan kompetensi dan profesionalisme staf untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Meningkatkan citra dan kredibilitas meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap pengadilan negeri manado melalui transparansi dan akuntabilitas.

b. Tujuan pengadilan negeri manado

- 1.) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat seluruh wilayah Sulawesi utara
- 2.) menegakkan hukum berkeadilan
- 3.) mewujudkan pengadilan negeri manado yang profesional
- 4.) modernisasi pelayanan pengadilan negeri manado
- 5.) menerapkan manajemen pengadilan negeri manado yang terintegrasi terpercaya

4.4 Logo Pengadilan Negeri Manado Pn



Gambar 1.1

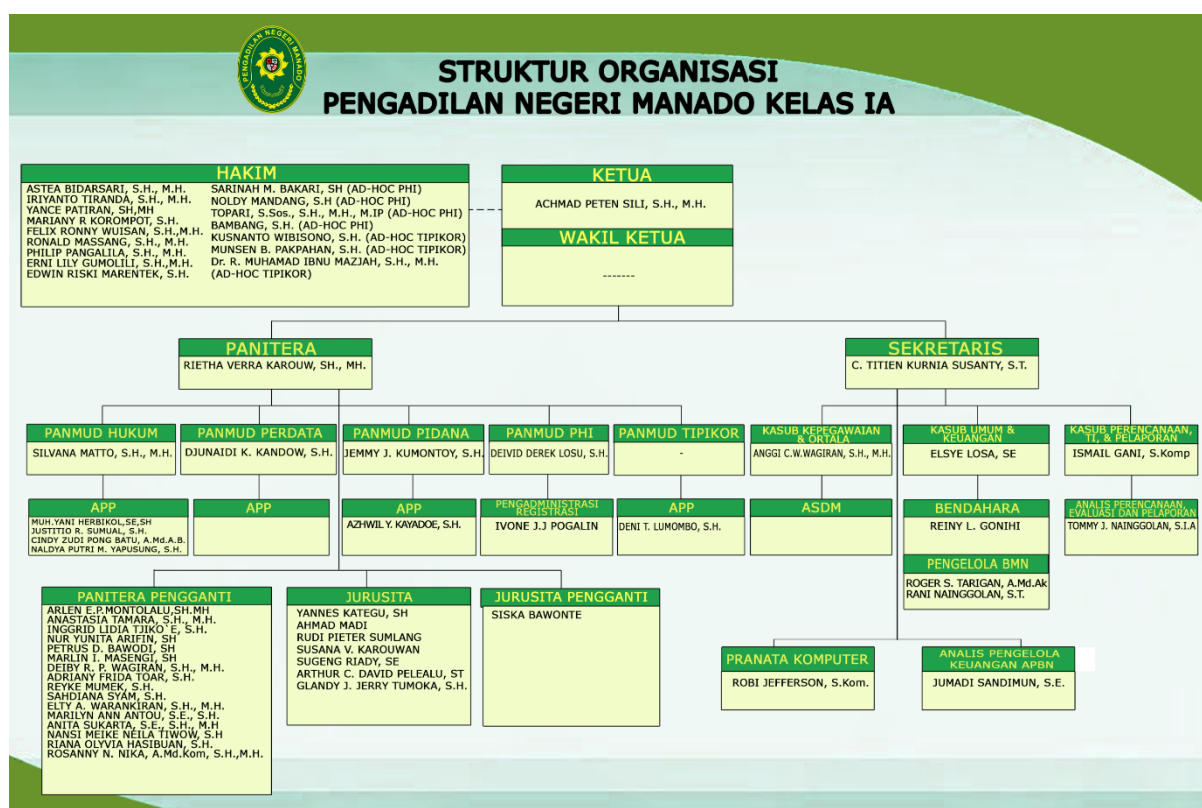
Logo pengadilan negeri manado pn

Sumber: pengadilan negeri manado

4.5 Strtuktur Organisasi

Struktur organisasi adalah satu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Jadi ada satu bertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MANADO PN



Gambar 1.2 struktur organisasi

Sumber: pengadilan negeri manado

a. Kebijakan Umum Peradilan negeri manado

Suatu organisasi, betapapun besarnya baik secara material maupun nonmaterial akan selalu memerlukan pedoman dalam setiap gerak langkahnya termasuk dalam melaksanakan roda organisasi. Ketika suatu organisasi memiliki cita-cita untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan pendiri serta anggota organisasi maka pematangan konsep adalah kunci keberhasilannya. Pematangan konsep yang dimaksud adalah mempertimbangkan segala hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kinerja organisasi sebelum kita menetapkan suatu kegiatan yang tepat bagi organisasi, keinginan keinginan serta tatacara membangun organisasi tentunya berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan cara untuk mencapai cita cita organisasi sebaiknya terjabarkan dalam suatu program kerja yang disahkan secara bersama, sesuai dengan konstitusi organisasi.

Program kerja akan menjadi suatu kebutuhan primer bagi suatu organisasi karena dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur. Program kerja organisasi baru dapat dibuat dengan sistematis, terarah dan terpadu jika urutan proses menuju pembuatan program kerja telah dilalui dengan baik, artinya organisasi telah memiliki dasar dasar acuan tentang “jiwa” dari program kerja yang dibuat ;

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi. Ada dua alasan pokok mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi.

b. Efisiensi organisasi :

Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.

1. Efektifitas organisasi :

Keefektifan Organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya

c. Pengelolaan Keuangan

Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara (clean governance) serta terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (good governance) menuntut adanya keterbukaan informasi public yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi (TI) yang terus berkembang pesat.

TI dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan data melalui system yang terintegrasi dan modern. Pengadilan Negeri Manado telah mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui penggunaan system berbasis TI seperti Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Sistem Aplikasi Satker (SAS), Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi), Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) serta e-Rekon dan Laporan Keuangan (LK).

Aplikasi Terbaru E-BIMA dan E-Sadewa dari Mahkamah Agung RI. Aplikasi e-Rekon dan LK yang merupakan aplikasi berbasis web dengan single database. Aplikasi ini melakukan proses rekonsiliasi, penggabungan data serta menghasilkan laporan keuangan tingkat satuan kerja (Satker), Wilayah, eselon I hingga K/L sehingga laporan keuangan dapat disusun secara lebih cepat, berkualitas, mudah, simple, dan andal. Dalam hal pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Manado, untuk pemeriksaan dari Badan Pemeriksa keuangan, periode semester 1 dan semester 2 TA 2022 dan semester 1 TA 2023, tidak ada temuan satupun.

d Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

No	Prgram	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen	12.880.740.000	12,209,973,000	11,970,686,096	98.04%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI / HI/TIPIKOR MANADO KELAS 1A 2025

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasikan tercatat total sisa pagu belanja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar rp. 239,286,904 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) atau sebesar 1,96 %.

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Reliasasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen (Belanja Barang)	2.057.906.000	2,049,242,000	2,013,465,896	98,25%

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasikan tercatat total sisa pagu belanja barang dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 35,776,104 (Tiga puluh Lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat rupiah) atau sebesar 1,75 %.

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan Umum	8.664.000	8,664,000	8,651,600	99.86%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI / HI/TIPIKOR MANADO KELAS 1A 2025

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasikan tercatat total sisa pagu belanja barang dalam layanan umum sebesar rp. 12,400 (dua belas ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 0,14%

Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	52.815.000	52.815.000	52,601,445	99.60%

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasikan tercatat total sisa pagu belanja modal dalam program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung sebesar Rp. 213,555 (dua ratus tiga belas lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 0,40

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	218.095,00	218,095,000	217,182,358	99.58%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI / HI/TIPIKOR MANADO KELAS 1A 2025

Berdasarkan pagu anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang telah diterima dan anggaran yang telah direalisasikan tercatat total sisa pagu belanja program Program Peningkatan Manajemen Peradilan sebesar Rp. 912,642,00 (Sembilan ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 0,42 %.

e. Penerimaan Negara Pajak :

DIPA 099329	JUMLAH
	(Rp)
TARGET 2023	: 13.550.000
DITERIMA	: 9.850.896
DISETOR	: 9.850.896
PERSENTASE	: 72,70%
DIPA 099330	: JUMLAH
	: (Rp)
TARGET 2023	: 54.461.000
DITERIMA	: 206.587.000
DISETOR	: 206.587.000
PERSENTASE	: 379,33%

f. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Dalam proses pengelolaan BMN sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara elektronik. Pengadilan Negeri Manado menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan informasi asset yang lengkap dan valid sekaligus mempermudah pengelolaan dan penatausahaan asset secara real time. Pada tanggal 8 maret 2025, Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi E-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application). Pengadilan negeri Manado juga ikut menggunakan aplikasi e-SADEWA. Keadaan sarana peralatan kantor menurut jenis yang ada saat ini secara terinci dapat terlihat pada lampiran Barang Inventaris. Pada PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR MANADO KLAS 1A terdapat sarana dan prasarana

Berikut beberapa tantangan yang umum dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan di Pengadilan Negeri (PN) — yang juga relevan untuk PN Manado — berdasarkan berbagai sumber kredibel

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusi kekurangan pegawai dalam posisi penting—baik dari sisi teknis maupun administratif—membatasi efektivitas proses pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup minimnya pelatihan dalam penggunaan sistem digital, serta keterbatasan jumlah staf yang sesuai dengan kebutuhan beban kerja .
2. Infrastruktur dan Sarana Prasarana TI yang Tidak Memadai Penggunaan teknologi digital masih terbatas karena kurangnya infrastruktur dan sistem TI yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini menghambat efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan .
3. Minimnya Transparansi dan Sistem Kendali Internal
Menurut hasil audit BPK pada Mahkamah Agung, pelaporan biaya perkara serta pengelolaan aset tidak sepenuhnya transparan atau sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini membuka peluang penyalahgunaan dan menurunkan kepercayaan publik .
4. Prosedur Administratif yang Rumit dan Berbeli lamanya prosedur pengelolaan keuangan—dari pendaftaran perkara hingga realisasi anggaran—dapat menyebabkan biaya sulit diprediksi, berpotensi menimbulkan penundaan dan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat .
5. Tantangan Implementasi Digitalisasi walaupun terdapat inisiatif seperti aplikasi TORANG untuk monitoring kinerja di PN Manado, inisiatif semacam ini biasanya masih terbatas cakupannya dan belum terintegrasi penuh dengan sistem keuangan perkara atau akuntansi keuangan peradilan .

Rangkuman Tantangan untuk PN Manado

Jika diterjemahkan secara spesifik ke konteks PN Manado, berikut adalah poin-poin relevan:

g. Tantangan

1. adanya standar baku untuk pelayanan keuangan dan potensi peran ganda dalam struktur keuangan
2. Keterbatasan SDM, baik jumlah maupun kompetensi dalam sistem digitalisasi keuangan
3. Infrastruktur TI belum memadai untuk mendukung pengelolaan keuangan terintegrasi
4. Sistem pengendalian intern dan transparansi dalam pelaporan keuangan masih perlu diperkuat
5. Prosedur administratif panjang yang menghambat efisiensi dan transparansi
6. Digitalisasi keuangan masih parsial dan perlu perluasan ke seluruh aspek pengelolaan keuangan

Rekomendasi awal untuk mengatasi tantangan tersebut, pn manado dapat mempertimbangkan: menyusun sop/pedoman baku terkait penerimaan dan belanja perkara. Meningkatkan sdm dengan pelatihan sistem informasi keuangan digital. Memperkuat infrastruktur ti agar mendukung sistem pengelolaan keuangan. Memperbaiki mekanisme audit internal dan transparansi laporan keuangan.

Menyederhanakan prosedur administratif untuk mempercepat aliran dana dan pelaporan.

Memperluas digitalisasi dari monitoring kinerja (seperti torang) ke sistem keuangan yang terintegrasi.

Jika Anda ingin mendalami aspek tertentu, seperti sistem digitalisasi keuangan yang sudah diterapkan di PN Manado atau studi kasus serupa di daerah lain, saya siap bantu!

4.5 Uraian Pekerjaan

Uraian pekerjaan di tempat praktik pada pengadilan negeri manado, khususnya di ruangan tipikor (tindak pidana korupsi), mencakup berbagai tugas yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi, mulai dari penerimaan berkas hingga pemberitahuan putusan. Ruangan tipikor ini merupakan bagian dari pengadilan negeri yang khusus menangani kasus-kasus korupsi.

Tugas dan fungsi ruangan tipikor di pengadilan negeri manado:

1. Penerimaan dan pemeriksaan berkas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara tindak pidana korupsi yang masuk, termasuk kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi.
2. Registrasi perkara melakukan registrasi atau pencatatan perkara korupsi yang telah memenuhi persyaratan untuk kemudian didistribusikan kepada majelis hakim yang ditunjuk.
3. Distribusi perkara mendistribusikan perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri untuk disidangkan.
4. Penyusunan administrasi persidangan menyiapkan dan mengelola dokumen serta administrasi yang berkaitan dengan proses persidangan, seperti penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan lain-lain.
5. Penerimaan permohonan izin menerima permohonan izin penggeledahan atau penyitaan dari penyidik yang terkait dengan kasus korupsi.
6. Penerimaan berkas putusan menerima kembali berkas perkara yang sudah diputus oleh majelis hakim dan sudah dimintakan putusannya.
7. Pemberitahuan putusan menyampaikan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang tidak hadir, serta menyampaikan pemberitahuan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak yang bersangkutan.
8. Pengiriman berkas banding, kasasi, dan pk mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung.
9. Pengawasan pemberitahuan putusan mengawasi proses pemberitahuan putusan upaya hukum kepada para pihak dan memastikan relaas penyerahan putusan disampaikan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung.

Tugas tambahan:

melakukan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa.

Secara keseluruhan, tugas di ruangan tipikor pengadilan negeri manado melibatkan proses administrasi dan pengawasan yang sangat penting dalam penanganan perkara korupsi, mulai dari penerimaan hingga putusan akhir.

a. Pelayanan persidangan

Pelayanan persidangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum, baik pidana maupun perdata. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerimaan perkara, pemanggilan pihak, proses persidangan, hingga penyelesaian perkara dan pemberkasan.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pelayanan persidangan

1. Pelayanan administrasi persidangan penerimaan dan pendaftaran perkara, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara, penyediaan informasi terkait perkembangan perkara, pengaturan jadwal sidang, penyediaan juru bahasa jika diperlukan.
2. Tahapan proses persidangan dan penyampaian gugatan atau dakwaan.
Jawaban tergugat atau terdakwa replika dan duplik (tanggapan terhadap jawaban).
pembuktian (pengajuan bukti-bukti oleh para pihak) Kesimpulan Putusan hakim.
3. Pelayanan khusus sidang tindak pidana ringan (tilang), mediasi di pengadilan, pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan bantuan hukum.
4. Standar waktu penyelesaian pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) berusaha memutus perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejak perkara didaftarkan menurut pengadilan negeri tahuna. Penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama (pengadilan negeri) umumnya memakan waktu satu hingga tiga bulan, terutama jika terdakwa ditahan menurut hukumonline.
5. Keterbukaan informasi pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang dan informasi putusan. Pihak yang berperkara berhak memperoleh informasi terkait perkembangan perkara melalui berbagai media, termasuk situs pengadilan.
6. Fasilitas pendukung: meja informasi untuk pelayanan publik, ruang tunggu sidang, fasilitas untuk penyandang disabilitas.
7. Peran mediator mediator berperan dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian.jika tercapai kesepakatan, dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh akta perdamaian penting untuk dicatat standar pelayanan persidangan dapat berbeda-beda di setiap pengadilan. masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika merasa pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik dalam kondisi tertentu

b. Aktivitas Kantor

Aktivitas kantor pengadilan negeri manado meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi peradiln umum, termasuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selain itu, pengadilan juga memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah jika diminta.

Rincian aktivitas kantor:

1. Pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara pengadilan negeri manado bertugas
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang diajukan ke pengadilan tersebut di tingkat pertama.
2. Pelaksanaan administrasi perkara pengadilan mengelola administrasi perkara pidana, perdata, dan khusus, serta menyajikan data perkara dan transparansi perkara.
3. Pelaksanaan mediasi pengadilan memfasilitasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.
4. Pemberian keterangan dan pertimbangan hukum pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah atas permintaan mereka.
5. Pelaksanaan tugas kepaniteraan panitera melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan tugas-tugas teknis, serta pengelolaan administrasi perkara dan keuangan.
6. Pelaksanaan tugas kesekretariatan sekretaris melaksanakan tugas-tugas administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian di pengadilan negeri manado.
7. Struktur organisasi pengadilan negeri manado memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum, serta berbagai sub bagian yang mendukung operasional pengadilan.

4.1 Proses Pengelolaan Keuangan Yang Diterapkan Di Pengadilan Negeri Manado

Berikut adalah proses pengelolaan keuangan yang berlaku di pengadilan negeri manado, sebagaimana diperinci dalam tugas dan fungsi kepala sub-bagian umum dan keuangan:

Tugas dan prosedur keuangan di pengadilan negeri manado

1. Penggajian dan tunjangan menyusun gaji induk serta gaji susulan, kekurangan gaji, uang kehormatan bagi hakim ad-hoc phi dan tipikor, uang makan, uang lembur, gaji ke-13, serta remunerasi beserta pertanggungjawabannya.
2. Pengajuan up (uang persediaan) / tup (tambahan uang persediaan) mengajukan permintaan up atau tup, termasuk pengantiannya, ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) sesuai ketentuan pmk no. 190/pmk.05/2012
3. Pembayaran dan pembukuan menyusun surat perintah pembayaran (spp) menggunakan aplikasi spm, menyimpan backup datanya. menerima, membukukan, dan menyetor pnbp (penerimaan negara bukan pajak) ke bank persepsi, serta melaporkan bukti penyetoran ke sekretaris dan korwil setiap bulan. Menginput tagihan dan melakukan pembayaran dengan memanfaatkan aplikasi silabi.
4. Pelaporan pajak memungut pajak (ppn, pph 21, 22, 23), kemudian melaporkannya ke kantor pajak paling lambat tanggal 14 setiap bulan.
5. Pertanggungjawaban bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban (lpj) untuk bendahara penerimaan dan pengeluaran, serta melaporkannya ke kppn.
6. Laporan bulanan & rekonsiliasi menyusun laporan bulanan melalui aplikasi sapla dan mengajukan rekonsiliasi ke kppn setiap bulan paling lambat 7 hari kerja di awal bulan. Laporan realisasi anggaran menyusun laporan bulanan melalui aplikasi sapla dan mengajukan rekonsiliasi ke kppn setiap bulan paling lambat 7 hari kerja di awal bulan.
7. Laporan realisasi anggaran menyusun laporan realisasi anggaran dan menyampaikannya kepada korwil.
8. Laporan berkala menyusun laporan triwulanan menggunakan aplikasi bapennas (sesuai pp no. 39 tahun 2006), berikut laporan semesteran dan tahunan—termasuk catatan atas laporan keuangan.

4.2 Apa Saja Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Manado

Berikut beberapa tantangan utama yang kerap dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan khususnya di pengadilan negeri seperti pn manado:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (sdm) dan kapasitas teknis pengelolaan keuangan di pengadilan negeri umumnya melibatkan sdm di bagian perencanaan, pelaporan, dan keuangan. Keterbatasan jumlah pegawai berpengalaman atau pelatihan khusus dapat menghambat penyusunan dokumen seperti rkakl (rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga) secara akurat dan tepat waktu, seperti terlihat di pn manado.

Sdm yang kurang siap juga dapat menyulitkan implementasi inovasi digital atau sistem informasi baru, seperti aplikasi torang, apabila pelatihan atau pendampingan tidak memadai
2. Pengembangan dan adopsi sistem informasi digital meskipun pn manado telah mengembangkan aplikasi seperti torang (monitoring kinerja bagian kesekretariatan berbasis digital) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, masih diperlukan komitmen kuat untuk memastikan integrasi penuh dengan sistem keuangan lain, seperti sistem pengadaan dan laporan keuangan elektronik. Masih ada tantangan umum dalam lembaga peradilan untuk menyatukan berbagai sistem (*e-court*, sipp, torang, dsb.) Agar data keuangan berjalan otomatis, konsisten, dan terintegrasi secara efektif.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya transparansi adalah aspek penting dalam pengelolaan biaya perkara seperti biaya panjar pada kasus perdata agar terhindar dari prasangka ataupun penyalahgunaan. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan mekanisme pembayaran dan informasi kepada masyarakat sangat membantu membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas. Tantangan muncul jika prosedur internal tidak konsisten, informasi tidak terdokumentasi secara rapi, atau komunikasi kepada masyarakat kurang efektif, yang memicu kebingungan atau potensi penyalahgunaan.
4. Koordinasi antar-lembaga dan penguatan pengawasan Implementasi pengelolaan keuangan tidak hanya internal (dalam pn), tetapi melibatkan berbagai pihak: pengadilan tinggi, mahkamah agung, serta instansi eksternal (kementerian keuangan, kppn, djkn). Koordinasi yang lemah bisa menimbulkan keterlambatan anggaran, pelaporan, maupun audit. Kurangnya sinergi ini juga dapat berdampak pada efektivitas monitoring keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi seperti perma (peraturan mahkamah agung).
5. Tantangan umum seperti korupsi dan kompleksitas regulasi meskipun bukan hal spesifik pn manado, sistem peradilan di indonesia secara umum tetap menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, politisasi, serta budaya toleransi terhadap korupsi.

Peraturan yang tumpang tindih atau berubah-ubah juga menuntut pengadilan untuk terus memperbarui dan menyesuaikan mekanisme keuangan internal agar tetap patuh dan efektif.

Ringkasan tantangan

No. Tantangan utama dampak potensial

- a. sdm & kapasitas teknis keterlambatan penyusunan anggaran & pelaporan
- b. implementasi sistem digital fragmentasi data, kurang sistematis dalam monitoring
- c. transparansi & akuntabilitas hilangnya kepercayaan publik, risiko penyalahgunaan
- d. koordinasi lintas lembaga keterlambatan anggaran, audit, atau pelaporan fiskal
- e. korupsi & regulasi kompleks inefisiensi pengelolaan, risiko integritas

Rekomendasi strategis

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah strategi dapat dipertimbangkan:

Penguatan kapasitas pelatihan berkelanjutan bagi petugas keuangan baik soal aturan keuangan negara maupun penggunaan sistem digital.

Integrasi sistem digital: sinkronisasi torang, *e-court*, sipp, dan keuangan agar data mengalir otomatis dan terpantau real time.

Audit dan monitoring ketat peningkatan frekuensi audit internal dan eksternal, terutama terkait penggunaan anggaran dan biaya perkara.

Peningkatan transparansi publikasi laporan keuangan secara berkala, termasuk biaya panjar dan realisasi serapan anggaran.

Memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas lembaga: rapat koordinasi rutin dengan pengadilan tinggi, mahkamah agung, dan instansi keuangan terkait untuk memastikan compliance dan penyelesaian hambatan.

Jika kamu ingin lebih dalam membahas satu aspek tertentu seperti sistem digital atau transparansi biaya perkara silakan beri tahu, ya! Saya siap bantu gali lebih lanjut.

4.3 Efektitas Sistem Pengelolaan Keuangan Yang Terapkan Oleh Pengadilan Negeri Manado

Maaf, tetapi saya tidak menemukan informasi spesifik mengenai efektivitas sistem pengelolaan keuangan di pengadilan negeri manado pada hasil pencarian web. Tidak tampak adanya studi evaluasi, laporan resmi, atau artikel akademik yang secara langsung menilai efektivitas sistem keuangan di instansi tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa informasi terkait inovasi dan sistem pengelolaan yang diterapkan di lingkungan peradilan di manado, yang bisa menjadi dasar pemahaman

Inovasi dan sistem terkini di pengadilan negeri manado

1. Aplikasi torang (monitoring kinerja bagian kesekretariatan berbasis digital) Diluncurkan pada 1 oktober 2024, aplikasi torang dirancang untuk memudahkan pimpinan dalam memantau dan menilai kinerja bagian kesekretariatan secara real time. Hal ini mendukung efektivitas pengawasan internal dan memungkinkan pengambilan keputusan strategis secara lebih cepat dan akurat.
2. Bimbingan teknis bidang umum dan keuangan Pada tahun 2022, pengadilan tinggi manado mengadakan bimtek keuangan yang diikuti oleh satuan kerja di wilayah hukum manado, termasuk pengadilan negeri manado. Materi diberikan oleh instansi terkait seperti kpkn, djpb, dan biro keuangan ma ri.

Tujuannya adalah memperkuat kompetensi dan kemampuan pegawai dalam praktik pengelolaan keuangan peradilan. Analogi dari satuan kerja lain sebagai referensi

Karena tidak ada data langsung untuk pn manado, kita bisa merujuk pada beberapa studi atau praktik di lembaga sejenis atau pemerintahan daerah lainnya sebagai gambaran umum:

Pengadilan agama manado menerapkan sistem e-bima sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan secara real-time dan transparan, antara lain dalam pengawasan anggaran, realisasi dipa, pnbp, hingga kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan instansi.

Di lingkungan pemerintahan daerah (seperti dinas pendapatan daerah kota manado), sistem pengendalian intern dilaporkan sudah efektif dan memadai untuk memastikan kinerja yang baik.

Rangkuman dan analisis awal

Aspek rangkuman tidak ada evaluasi langsung belum ditemukan penelitian atau laporan formal yang menilai efektivitas sistem keuangan di pn manado.

Penerapan digitalisasi dan monitoring

Inovasi seperti torang menunjukkan adanya upaya signifikan dalam memperkuat monitoring dan efektivitas administrasi internal.

Pengembangan sdm dan kepatuhan bimtek keuangan yang dilakukan memberikan landasan kemampuan teknis bagi pegawai dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan sesuai prosedur.

Transparansi dan real-time monitoring (di lembaga lain) dengan contoh e-bima di pengadilan agama manado, kita melihat potensi penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas sistem keuangan.

Rekomendasi langkah berikutnya

Jika anda ingin mengukur atau memperoleh informasi lebih konkret mengenai efektivitas sistem pengelolaan keuangan di pengadilan negeri manado, berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh

1. Menghubungi langsung pihak pengadilan negeri manado, ke bagian kesekretariatan atau keuangan, untuk meminta data evaluasi, audit internal, atau laporan penggunaan aplikasi torang dan dampaknya.
2. Mencari laporan wasbin atau audit kppn/ pengadilan tinggi yang pernah menyelenggarakan pengawasan atau bimbingan di pn manado seringkali terdapat rekomendasi atau temuan terkait sistem keuangan.
3. Bandingkan dengan praktik baik dari lembaga lain seperti pengadilan agama manado (e-bima) atau badan pemerintahan daerah yang telah melakukan studi efektivitas pengelolaan keuangan—sebagai benchmark.
4. Dorong adanya studi atau evaluasi independen (universitas atau lembaga riset) terhadap sistem keuangan di lingkungan peradilan manado, untuk mengetahui kelemahan dan perbaikan yang diperlukan. Silakan beri tahu bila anda ingin saya bantu mencari kontak atau dokumen resmi, atau jika anda tertarik menggali lebih lanjut melalui pendekatan lainnya!

C. Pelaksanaan Dalam Penggunaan *E-Court* Pada Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Manado

1. Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Negeri Manado

Undang-undang dasar tahun 1945 telah menyatakan bahwa indonesia merupakan negara hukum. Sesuai dengan pernyataan tersebut, adanya salah satu prinsip negara yakni terdapatnya sebuah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain guna untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.⁵⁶

Peradilan yang ada di indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Asas tersebut sudah sesuai yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut, *international consortium for court excellence (icce)* menegaskan bahwa peradilan yang unggul adalah peradilan yang berjalan

Dengan efektif dan efisien, inilah yang menjadi salah satu parameter bagi sebuah peradilan yang unggul. Dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya yaitu sarana pendukung peradilan yakni teknologi informasi.⁵⁷ setiap tahun terdapat peningkatan jumlah kasus atau perkara yang tercatat dalam pengadilan dikarenakan populasi manusia terus meningkat, sehingga terdapat banyak masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Pengadilan seharusnya telah mengurangi peningkatan yang terjadi agar peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien. terbitnya peraturan mahkamah agung (perma) no. 7 tahun 2024 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, merupakan hal yang dilaksanakan dalam memenuhi asas peradilan yakni secara sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan. Munculnya layanan dengan sistem *e- court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.

Peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 merupakan perubahan sekaligus komitmen bagi mahkamah agung republik indonesia untuk mewujudkan suatu perubahan di dunia peradilan indonesia yang menghubungkan antara peran teknologi informasi dengan Hukum acara.dengan disahkannya peraturan mahkamah agung no. 7 tahun 2024 perubahan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2019, hal inilah yang menjadi tiang awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan.

Ruang lingkup layanan aplikasi e-court di pengadilan negeri manado wibawa lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta keterbukaan informasi yang diberikan oleh lembaga peradilan. dalam konteks itulah, maka mahkamah agung republik indonesia terus mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang transparasi, dan akuntabilitas. aplikasi *e-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna non terdaftar yaitu advoked dan pengguna non terdaftar yaitu masyarakat atau perseorangan pencari keadilan. aplikasi *e-court* diperuntukkan untuk pendaftaran perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana menggunakan aplikasi zoom.

Syarat serta ketentuan umum penggunaan aplikasi e-court.⁶⁰ ketentuan ini berlaku untuk semua pengguna aplikasi *e-court*:

- a. aplikasi *e-court* terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik, modul pembayaran perkara secara elektronik, modul pemberitahuan secara elektronik.
- b. penggunaan aplikasi *e-court* hanya dikenakan untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan.^{22 m}
- c. pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
- d. pengguna terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apapun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi *e-court*, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.

- e. pengguna terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi *e-court*.
- f. pengguna terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi *e-court* untuk melakukan tindakan-tindakan illegal.
- g. pengguna terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi *e-court* ke orang lain.
- h. seluruh transaksi pada aplikasi *e-court* dan modul-modul dibawahnya hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.

b. Menu layanan aplikasi *e-court*

pendaftaran perkara secara online (e-filing) pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang di daftarkan di peradilan umum, peradilan agama peradilan tun yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, sehingga ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan dalam beracara di pengadilan.⁶¹ keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-court* yaitu: menghemat waktu dan biaya dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank, dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media serta proses temu data kembali yang lebih cepat. dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang degenerate secara elektronik oleh aplikasi *ecourt*.

Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening vitual untuk pembayaran biaya panjar perkara.⁶² Tata cara pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar atau advokat yaitu secara daring melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:⁶³ a) Memilih Pengadilan yang berwenang.

- a. Mendaftarkan surat kuasa khusus.
- b. Membayar NPBP pendaftaran surat kuasa.
- c. Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara).
- d. Menginput data pihak.
- e. Mengunggah (upload) dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik.
- f. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (E-SKUM). Pengguna terdaftar dapat melakukan pembayaran secara elektronik.

G. Tabel 4.2 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan

Dimensi	Keterangan	Tanggapan	Jumlah Responden
Tangible	Pelayanan berupa ketersediaan fasilitas yang ada. -Ruang Tunggu yang Ber-AC, memiliki Tv. -Baik Halaman Parkir. -Ruangan yang nyaman dan bersih.	Sangat baik	10
		Kurang	30
		Baik	-
			-
		Sangat kurang	-
Reability	Kemampuan serta ketepatan memberikan Pelayanan kepada pelanggan -Memberikan arahan kepada Pemohon dalam pengisian surat pernyataan	Sangat baik	-
		Kurang	40
		Baik	-
			-
		Sangat kurang	-
Responsiveness	Pelayanan yang diberikan harus reponsif, cepat, sopan , tepat. -Menjelaskan kepada pemohon persyaratan apa saja yang harus Di penuhi bagi yang baru pertama pengadilan. -Adanya umpan balik antara petugas dan pemohon	Sangat baik	-
		Kurang	15
		Baik	35
			-
		Sangat kurang	
Assurance	Jaminan Pelayanan yang diberikan secara Sopan, menarik, memuaskan masyarakat dan berkualitas -menanggapi dengan cepat jika pemohon Bertanya sesuatu seputar pembuatan peraktek - kedisiplinan waktu petugas dalam pelayanan	Sangat baik	-
		Kurang	10
		Baik	30
		Sangat kurang	
			-
Emphaty	Wujud sikap perhatian kepada masyarakat -memberikan informasi , misalnya jika ada Pemohon yang bertanya tempat lokasi fotocopy	Sangat baik	10
		Kurang	30
		Baik	-
		Sangat kurang	-

Sumber Data : Olahan Sendiri

H. Berdasarkan Tabel 4.2 Maka Dapat Di Simpulkan Bahwa :

1. Reliability

Kemampuan memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan yang di harapkan, seperti kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan dalam menepsti janji, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk meminimkan kesalahan. Suatu pelayanan akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau dalam pelayanannya di barengi dengan prinsip kejujuran. dalam hal ini kantor pengadilan merupakan unit pelaksana pemerintah yang bertugas melayani masyarakat umum, sehingga kejujuran sangatlah penting. di dimensi ini terlihat 40 responden yang memberikan tanggapan baik dalam hal ini para pegawai berhasil memberikan pelayanan yang baik kepada para pemohon.

2. Tangible

menyangkut kemampuan kantor pengadilan negeri manado untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik, keadaan lingkungan sekitarnya, serta bukti nyata dari pelayanan yang di berikan oleh pemberi jasa. Sebagai unit pelaksana pemerintah fasilitas serta prasarana yang mendukung akan menimbulkan citra yang baik dari masyarakat umum kepada pemerintah dalam melayani masyarakat umum.

- a. Peralatan dan teknologi online system kantor pengadilan negeri manado melengkapi *computer* –komputer dengan internet, karena dalam pembuatan surat surat harus secara online.
- b. Kenyamanan ruang pelayanan kantor pengadilan negeri manado melengkapi ruang pelayanan dengan berbagai fasilitas seperti ac, wifi, tv guna kenyamanan para pemohon. dalam dimensi tangible ini terdapat sekitar 30 responden yang memberikan tanggapan baik. dalam hal ini kantor pengadilan negeri manado memberikan pelayanan berupa fasilitas cukup baik. 28

3. Responsiveness

memberikan tanggapan terhadap pelanggan (pemohon) adalah salah satu hal yang harus dilakukan dalam pelayanan. Misalnya, ada beberapa pemohon yang baru pertama kali dalam membuat surat, sebagai petugas yang sudah menjadi bagian dalam pelayanan untuk mengarahkan pemohon memberitahukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam mengurus pengadilan negeri manado, batas pemasukan dokumen, agar pemohon paham dengan prosedur yang ada dan mulai memahami apa yang harus dilakukan.

dengan begitu pemohon akan merasa nyaman dalam pelayanan. di pengadilan negeri manado sekitar 25 pengelolaan keuangan dengan baik.

Jika demikian kantor pengadilan negeri manado belum memberikan surat yang begitu baik kepada pemohon sehingga responden memberikan

4. Assurance

jaminan yang diberikan kepada pelanggan (pemohon). petugas harus memiliki pengetahuan lebih, seputar pembuatan surat, misalnya ada pemohon yang baru pertama kali membuat surat terus menanyakan masa berlaku surat berapa lama. petugas harus bisa menjawab. dimana jaminan melayani dengan baik dan penuh. kedisiplinan waktu juga hal yang paling menjadi jaminan, bahwa petugas melayani tepat dan cepat sesuai waktu. Kalau misalnya petugas sering terlambat, terus ada pemohon yang sudah menunggu dari tadi, tentu akan sangat mempengaruhi pelayanan. dan tentu saja citra yang baik dalam pelayanan akan baik hanya karena disiplinnya waktu dari petugas.

dalam dimensi assurance dapat dilihat sekitar 30 responden yang memberikan tanggapan mampu dalam hal ini berarti kantor pengadilan negeri manado mampu memenuhi jaminan yang dijanjikan sehingga responden memberikan respon yang baik. dalam hal ini tingkat kedisiplinan waktu yang baik diterapkan. 29

Empathy wujud kepedulian pegawai merupakan salah satu hal penting dalam pelayanan. Semakin tinggi pendapat seseorang biasanya semakin ingin diperlakukan khusus. Atau misalnya ada beberapa yang datang dengan permasalahan yang berbeda-beda.

Dengan cakap pegawai harus bisa mendengarkan dan memberikan solusi yang tepat dengan memberikan saran dan masukan. di dimensi terdapat 30 responden baik, berarti ini kantor pengadilan negeri manado cukup baik, dalam memberikan empati kepada pemohon. dari kelima dimensi di atas, dimensi ke-empat assurance sangat berhubungan dengan kedisiplinan pegawai, yang mana dimensi ini harus diterapkan agar proses pengurusan surat-surat dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Jaminan inilah yang sangat diharapkan oleh para pemohon. Kelima dimensi pelayanan ini pada dasarnya identik dengan pelayanan jasa yang memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga proses pelayanan dari petugas harus ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDAS

51 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian hasil dan pembahasan diatas, penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan implementasi pengelolaan keuangan pada pengadilan negeri manado berada pada jalur yang benar dalam hal kepatuhan trandap regulasi dan penerapan sistem digital. namun, efektivitasnya masih trahmbat oleh keterbatasan teknis dan sumber daya manusia. untuk mencapai pengelolaan keuangan yang ideal dibutuhkan penguatan kapasitas internal, pemenfaatan teknologi yang lebih maksimal, serta sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap risiko, yang sangat berkaitan erat dengan kedisiplinan waktu petugas atau pegawai dalam memberikan pelayanan, mendapatkan respon yang baik, dapat disimpulkan bahwa kedisipinan waktu baik
- b. penelitian dapat dinyatakan bahwa implementasi pengelolaan keuangan pada pengadilan negeri manado telah berjalan dengan baik secara normatif namun dalam praktiknya masih menghandapi sejumlah tantangan teknis dan sturktural.

5.2 Renkomentasi

- a. dengan adanya penulis akan mengemukakan beberapa saran, dibawah ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi kepentingan instansi dimasa yang akan datang. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut.
- b. Sebaiknya pegawai memelihara hubungan komunikasi dan koordinasi baik diantara satu bagian ke bagian yang lain agar kerja sama yang baik pula sebelum menyerahkan gaji sebaiknya dilakukan pengecekan ulang supaya tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

analisis implelementasi pengelolaan keuanagan pengadilan negeri manado, 'Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan nrgeri manado 1.1 (2020), 72–104

Adliya, 'Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk 1', *Sunan Gunung Djati State Islamic University*, 9.1 (2015), 1–118

Afriana, Anita, and Hazar Kusmayanti, 'Review of Syaria Economy Disputes in Religious Courts within the Perspective of Small Claims Court (SCC)', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2021), 183–94

Ahmad R, 'Peradilan Agama Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6.2 (2015), 312–39

Ainun Najib, 'Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 116–26

Ali, Mohammad Daud, 'Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15 (2017), 14

Anand, Nikhil, 'Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia', 24.19 (2017), 5–24

Busthami, Dachran, 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018), 336

Cahyani, Andi Intan, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 119 53

Niton Tabo, 'Metode Penelitian analisis implelementasi pengelolaan keuangan pada pengadilan keuangan pengadilan negeri manado: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti pengelolaan keuangan Depri', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 8.1 (2014), 15–35
Diktum, Jurnal Hukum, '03 Asriati - PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM TERAPAN', DPK. PTIQ Jakarta, 10 (2012), 23–39

Domiri, -, 'Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46.3 (2016), 327

Dr. Agus Prastyawan, M, Si, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, 2019

Dr. SUDIRMAN L, M.H, Hukum Acara Peradilan Agama, 2021

DRS, H, A, Basiq Djalil., S.H., M, A, Peradilan Agama Di Indonesia, 3rd edn (Jakarta: PT fajar Interpretama Mandiri, 2013)

Edi Gunawan, 'Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia', *Al-Syir'ah*, 15.2 (2017), 94–114

Fauzi, M Latif, 'Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri)', *Al-'Adalah*, 14.2 (2018), 367

Fuji Rahmadi P, 'Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat', *Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018

Hasyim Sofyan Lahilote, 'The Effectiveness of Mobile Court Implementation in Manado Religious Court', *Al-Istinbath*, 7.1 (2022), 55–74

Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, Ria Novianti, 'Adhaper', *Hukum Acara Perdata*, 1.2 (2015), 2442–9090

Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.); Revisi). Mirra Buana Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

(Kuesioner) Pendapat Masyarakat Tentang Penerapan Dimensi Pelayanan Publik

Bagaimana menurut Anda Pelayanan di Kantor pengadilan negeri manado ?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Bagaimana tingkat ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Menurut anda apakah kualitas pelayanan masyarakat sangat di perlukan ?

- A. Perlu
- B. Tidak Perlu

Bagaimana tingkat kesopanan dan keramahan petugas pelayanan?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Bagaimana tingkat keamanan lingkungan tempat pelayanan?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Bagaimana tingkat ketepatan petugas dalam memberikan jenis pelayanan?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Bagaimana tingkat kebersihan dan kerapian lingkungan tempat pelayanan?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |
| C. | |

Bagaimana tingkat kepedulian petugas kepada masyarakat ?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Bagaimana menurut Anda tentang Jaminan seperti Pelayanan yang Berkualitas ?

- | | |
|----------------|------------------|
| A. Sangat Baik | C. Kurang |
| B. Baik | D. Sangat Kurang |

Lamprian 2

Uraian Aktivitas Pekeryaan

Tanggal	Bagian	Uraian Tugas	Masalah Yang Didahpi	Penaggulagannya	Keterangan
2 Mare- April 2025		- Membuat Absen - Menetik surat - Menulis daftar Pembuat Paspur - Rekap Absen -Mengarsipkan dokumen	Mash kurang paham dengan pekerjaan yang di berikan. Beradaptasi dengan lingkungan kerja.	Bertanya kepada pegawai setempat dan di berikan arahan tentang pekerjaan yang di berika	-
1 April - Mei 2025		- Membuat Absen - Menetik surat - Menulis daftar Pembuat Paspur - Rekap Absen - Mengarsipkan dokumen	-	-	-
1 Mei - Juni 2025		- Membuat Absen - Menetik surat - Menulis daftar Pembuat Paspur - Rekap Absen -Mengarsipkan dokumen		-	-
		- Membuat Absen - Menetik surat - Menulis daftar Pembuat Paspur - Rekap Absen -Mengarsipkan dokumen	-	-	-